



**RILIS KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024 – 2025
KE PROVINSI SUMATERA SELATAN
TANGGAL 9 – 13 DESEMBER 2024**

Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja reses ke Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada tanggal 13 Desember 2024. Kegiatan pertemuan reses tersebut berlangsung di Auditorium Graha Bina Praja, Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, dalam rangka pengawasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan evaluasi pelaksanaan program pertanahan dan tata ruang di Provinsi Sumatera Selatan.

Acara tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H. (Fraksi Nadem), dan dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI dari berbagai fraksi, diantaranya H. M. Giri Ramanda N. Kiemas, S.E.,M.M, Ahmad Wazir Noviadi yang berasal dari daerah pemilihan Sumsel. Hadir pula para mitra Komisi II DPR RI antara lain Plh Direktur Polpum Kemendagri, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN, Pejabat Kanwil dan Kantah ATR/BPN se-Sumsel, serta tuan rumah Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi dan Pj Kepala Daerah Kabupaten/Kota se- Sumsel.

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi memaparkan beberapa hal tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah di Sumsel yang memiliki rasional kapasitas fisik kategori sedang. Selain itu, Elen juga menjelaskan Sumsel telah menerima DIPA dari Kemenkeu yang mengalami peningkatan TKD senilai Rp. 1, 7 Triliun.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, DR. H.M Rifqinizami Karsyuda menyampaikan bahwa kunjungan kerja ke Sumatera Selatan ini mengusung tema yang spesifik yakni Pengawasan Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Sumsel, baik evaluasi terhadap tahun anggaran 2024 yang sudah berjalan maupun untuk anggaran tahun 2025. Hal ini penting dilaksanakan karena selama ini anggaran pusat ke daerah setelah selesai tidak ada pengawsan sama sekali, sehingga Komisi II DPR berkomitmen untuk melaksanakan pengawasan TKD.

Selain itu, diketahui bahwa kemandirian fiskal daerah di wilayah Sumsel masih cukup rendah. Dimana PAD Provinsi maupun Kab/Kota jauh lebih rendah dibandingkan dana

APBN ke APBD kab/kota baik melalui Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) dan Dana Desa.

Komisi II DPR juga mencatat bahwa hingga akhir Oktober 2024, realisasi penyaluran TKD di Sumatera Selatan mencapai Rp27,38 triliun atau 85,82% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan. Penyaluran ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 12,28% secara year on year (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 70,78%. Kinerja penyaluran TKD ditopang oleh DBH, DAU, DAK, dan Dana Desa yang menunjukkan tren positif. Penyaluran TKD telah mendukung APBD di 18 pemerintah daerah di wilayah Sumatera Selatan.

Hal senada juga disampaikan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Andri Yogama bahwa secara umum Transfer Ke Daerah (TKD) di wilayah Sumselangkanya lebih besar dari pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kab/kota bersangkutan, bahkan beberapa daerah justru terjadi defisit anggaran.

Lebih lanjut, Ketua Komisi II DPR RI, DR. H.M Rifqinizami Karsyuda mengungkapkan bahwa Komisi II DPR RI dalam kesempatan kunjungan kerja reses ini juga melakukan pengawasan terhadap ijin Hak Guna Usaha (HGU) atas perkebunan kelapa sawit yang ada di provinsi Sumsel. Berdasarkan data yang ada, di Sumsel ada 50 perusahaan sawit yang telah beroperasi namun belum mempunyai HGU.

Maka dari itu, ia berharap Kementerian ATR/BPN dapat dengan kooperatif berkoordinasi bersama para kepala daerah di Provinsi Sumsel, khususnya di Kabupaten/Kota untuk memanggil para perusahaan-perusahaan agar segera mengeluarkan sertifikat HGU di masing-masing perkebunannya.

Jka hal itu tidak dilakukan, menurut Rifqi akan ada kerugian paling tidak dua hal. Pertama, perusahaan itu tidak memiliki legalitas terhadap tanah dan kebunnya dan kalau kemudian digugat dan seterusnya tentu memiliki kerugian dan kelemahan hukum. Kedua, negara dirugikan karena tidak ada pajak apapun yang masuk ke negara.

Sementara lanjutnya mereka telah menikmati tanah dengan segala keuntungan ekonominya. "Bagi Komisi II, satu hukum pertanahan itu harus tegak dan berdaulat di Indonesia. Yang kedua, Komisi II menjadi bagian dari signifikansinya pendapatan keuangan negara melalui sektor pertanahan ini," tegasnya.

Rifqi juga mengatakan Komisi II akan memperkenalkan konsep *land amnesty*, seperti halnya *tax amnesty*, sehingga perusahaan kelapa sawit yang sudah berpuluh-puluh tahun lalu tidak punya HGU, diampuni kemudian diberikan waktu kepada mereka untuk mendaftarkan ijin HGU dalam waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Melalui kunjungan kerja reses ini, Komisi II DPR berharap dari pertemuan dengan Pemprov Sumsel dan Kanwil BPN Sumsel dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dan solusi kebijakan terbaik pada tahun mendatang serta dapat menerima aspirasi dari masyarakat terkait hal tersebut. Komisi II DPR RI juga percaya bahwa sinergi yang kuat antara Komisi II, pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat akan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan.

Agenda kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI berakhir dengan peninjauan langsung simulasi program makan siang gratis di SMK Negeri 2 Palembang, Provinsi Sumsel.

Kota Palembang, 13 Desember 2024,
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan.